

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LANSIA TERLANTAR DALAM
MEMPEROLEH PELAYANAN PUBLIK**

(Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial di Panti Werdha dan Dinas Sosial Kabupaten Kediri)

JURNAL

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Aldilla Dharma Wijaya

NIM. 0910113006



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2013

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LANSIA TERLANTAR DALAM MEMPEROLEH PELAYANAN PUBLIK

Aldilla Dharma Wijaya, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : aldilla_dw@yahoo.com

ABSTRAKSI

Perlindungan sosial merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga Negara. Pemerintah secara khusus telah merumuskan berbagai peraturan yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyatnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Namun faktanya, hingga saat ini belum dibentuk peran khusus dari pemerintah dalam membantu lansia terlantar mendapatkan kesejahteraan sosial mereka, sehingga dapat dikatakan perlindungan hukum lansia terlantar di Indonesia masih kabur. Padahal secara tegas telah dijelaskan dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yaitu jaminan sosial harus menjamin kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terpenuhi dan jaminan sosial itu berupa asuransi kesejahteraan sosial. Dengan demikian penulis merasa penting dan sangat menarik untuk mengangkat permasalahan yaitu Mengapa pelaksanaan perlindungan hukum bagi lansia terlantar menurut pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dalam memperoleh pelayanan publik panti werdha belum terlaksana dengan baik dan konsep solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis karena hendak melihat dan meneliti tentang bagaimana pelaksanaan dan hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial di Kota Kediri.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, didapatkan bahwa Pemenuhan Jaminan Sosial bagi para lansia terlantar di Kabupaten Kediri tidak diperkuat dengan Perda ataupun Perbup Kabupaten Kediri, Anggaran Bantuan Sosial untuk lansia terlantar sangat kecil dan kepedulian Pemerintah Kabupaten Kediri sangat minim terhadap keberadaan lansia terlantar di Panti werdha dan para lansia terlantar kurang diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri. Konsep atau solusi yang ditawarkan adalah pelibatan PSKS dalam bentuk Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat.

Kata Kunci: Lansia Terlantar, Kesejahteraan Sosial

LEGAL PROTECTION FOR THE ELDERLY DISPLACED IN OBTAINING PUBLIC SERVICES

Aldilla Dharma Wijaya, Law Faculty Brawijaya University
Email : aldilla_dw@yahoo.com

ABSTRACTION

Social protection is a human right that belongs to every citizen. Governments in particular have formulated various regulations aimed at *menyejahterakan* people in law number 11 of 2009 about social welfare. But the fact is, until now, have not formed a special role of the Government in helping the elderly get abandoned their social welfare, so that it can be said legal protection wastelands in Indonesia still elderly blur. In fact expressly described in article 9 and 10 Law number 11 of 2009 about social welfare, social security must guarantee the basic needs of the disabled, social welfare Issues and social security were fulfilled in the form of social welfare insurance. Thus the authors feel important and very interesting to lift the issue that is Why implementation of legal protection for the elderly displaced according to article 9 and 10 Law number 11 of 2009 about social welfare in obtaining public services have not done nursing home and the concept of solutions offered by Kediri Regency Government.

In this study the author uses the method approach as to the juridical sociological look at and researching on how implementation and barriers that affect the implementation of Act No. 11 of 2009 about social welfare in the town of Kediri.

Upon the research results obtained by the authors, that the fulfillment of social security for the elderly in Kediri Regency, abandoned not reinforced with *Perbup* Kediri Regency or *Perda*, social assistance Budget for elderly displaced are very small and caring Kediri Regency Government was minimal to the existence in an abandoned *lanisa werdha* and the elderly displaced less noticed by the Kediri Regency Government. Concepts or solutions offered is the involvement in the form of Social Rehabilitation PSKS Based society.

Keywords: Elderly Displaced, Social Welfare

A. Pendahuluan

Mengentaskan kemiskinan hingga mencapai angka 0 untuk saat ini merupakan sebuah kemustahilan. Kenyataan itu merupakan sesuatu yang sangat realistis jika kita masih melihat banyaknya praktek-praktek melenceng yang masih ada dalam pemerintahan kita. Dewasa ini tingkat kesejahteraan penduduk di Indonesia masih dapat dikatakan jauh di bawah harapan yang ada. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun. Tercatat sudah sejak Maret 2012 penduduk miskin yang ada di Indonesia telah mencapai 29,13 juta orang (11,96 persen), berkurang 0,89 juta orang (0,53 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49 persen).¹

Dengan adanya keadaan kemiskinan di negeri ini sudah menjadi kewajiban bagi Negara untuk mengentaskannya dan hal ini telah jelas terpampang secara tegas dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 :

“...untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...”

Dalam kalimat tersebut dijelaskan bahwa telah menjadi kewajiban pokok bagi Negara Indonesia untuk dapat memberikan kehidupan yang layak secara menyeluruh hingga mendapatkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyatnya tanpa perkecualian. Oleh karenanya dengan konsep seperti itu maka Negara wajib memberikan perlindungan sosial bagi rakyatnya.

Dalam arti luas perlindungan sosial mencakup seluruh tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat, guna melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar, terutama kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan resiko; serta meningkatkan status sosial dan hak kelompok marjinal di setiap Negara.²

¹ <http://www.bps.go.id/?news=940>, diakses Oktober 2012

² Edi Suharto, 2009. **Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia**. CV. Alfabeta, Bandung. Hlm 3

Perlindungan sosial merupakan elemen paling penting strategi kebijakan publik dalam memerangi kemiskinan dan mengurangi penderitaan multidimensi yang dialami kelompok-kelompok lemah dan kurang beruntung. Sebagai sebuah kebijakan publik, maka perlindungan sosial merupakan satu tipe kebijakan sosial yang menunjuk pada berbagai bentuk pelayanan, ketetapan atau program yang dikembangkan oleh pemerintah untuk melindungi warganya, terutama kelompok rentan dan kurang beruntung, dari berbagai macam resiko ekonomi, sosial dan politik yang akan senantiasa menerpa kehidupan mereka. Selain kebijakan publik yang bersifat normal, definisi perlindungan sosial juga mencakup praktek-praktek informal, seperti arisan, sistem gotong royong dalam masyarakat, dukungan keluarga atau teman-teman serta skema-skema jaringan pengaman sosial yang berbasis masyarakat lainnya.

Dalam hal perlindungan sosial, pemerintah secara khusus telah merumuskan hal-hal yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyatnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan mampu menjadi payung bagi kaum marjinal dalam mempertahankan Hak Asasi Manusia mereka. Karena Dalam praktek kehidupan kita sehari-hari banyak kita temui penindasan Hak Asasi Manusia yang terjadi terhadap warga miskin.

Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa secara keseluruhan Negara wajib untuk mensejahterakan rakyat melalui berbagai macam cara. Salah satunya melalui Jaminan Sosial. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Dengan adanya jaminan sosial tersebut secara tidak langsung negara telah memberikan jaminan bagi rakyatnya dalam mendapatkan kesejahteraan hidup dalam taraf yang layak.³ Jaminan sosial juga dapat dikatakan merupakan salah satu jalan bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi rakyat miskin tersebut.

³ Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Dari data para penduduk miskin tersebut terdiri dari berbagai macam golongan usia yaitu dari anak-anak hingga lansia. Tercatat secara khusus jumlah lansia yang menjadi bagian dari penduduk miskin atau di sini disebut sebagai lansia terlantar mencapai angka 2,8 juta orang.⁴

Dengan melihat kerentanan khusus yang ada dalam lansia tersebut tentunya lansia perlu mendapatkan perhatian yang khusus dalam hal kesejahteraan sosial. Dan kehidupan lansia sebagian besar adalah tanggung jawab Pemerintah, termasuk berbagai kemudahan yang patut diterimanya seperti potongan biaya perjalanan, aksesibilitas umum, dana perlindungan hari tua, potongan biaya pengobatan, dan lain-lain.⁵

Namun hingga saat ini belum dibentuk peran khusus dari pemerintah dalam membantu lansia terlantar meraih kesejahteraan sosial mereka sehingga dapat dikatakan perlindungan hukum lansia terlantar di Indonesia masih kabur. Padahal secara tegas telah dijelaskan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyatakan :

Pasal 9

(1) *Jaminan sosial dimaksudkan untuk :*

- a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.*
- b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa- jasanya.*

(2) *Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.*

(3) *Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.*

Pasal 10

⁴ <http://www.Kfm.depsos.do.id>, diakses Oktober 2012

⁵ Yaumil C. Agoes Achir, 2001. **Bunga Rampai Psikologi Perkembangan Pribadi Dari Bayi Sampai Lansia**. UI Press, Jakarta. Hlm 185.

- (1) Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.*
- (2) Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah.*

Termasuk juga dalam lingkup daerah atau Peraturan Daerah. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa daerah diberikan kewenangan dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial namun tetap saja hingga saat ini di Kabupaten Kediri belum ada Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus tentang lansia terlantar. Padahal tercatat hingga saat ini ketika kita menyusuri jalan raya di Kabupaten Kediri masih banyak ditemui lansia terlantar yang jika diterjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mereka berhak mendapatkan pelayanan akses sosial salah satunya adalah masuk ke Panti Werdha.

Karena melihat permasalahan hukum yang ada mengenai kesejahteraan lansia tersebut maka penulis mengangkat judul "Perlindungan Hukum Bagi Lansia Terlantar Dalam Memperoleh Pelayanan Publik." dengan latar belakang keprihatinan penulis terhadap ketidakcakapan Pemerintah Kabupaten dalam menangani masalah yang ada mengenai lansia terlantar. Serta penulis mengangkat judul ini dengan harapan mampu menganalisis apa yang sebenarnya menjadi permasalahan Pemerintah Kabupaten dalam mengulurkan tangannya untuk pihak-pihak yang membutuhkan dalam hal ini lansia terlantar.

B. Masalah

Dengan memperhatikan alasan pemilihan judul penelitian, maka dirumuskan masalah untuk dijadikan pedoman penelitian hukum agar mencapai sasarannya. Adapun masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Mengapa pelaksanaan perlindungan hukum bagi lansia terlantar menurut pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dalam memperoleh pelayanan publik panti werdha belum terlaksana dengan baik?

2. Bagaimana konsep solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menyikapi hal tersebut?

C. Metode

Dari rumusan masalah yang diambil oleh penulis, maka penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis karena hendak melihat dan meneliti tentang bagaimana pelaksanaan dan hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial di Kota Kediri. Melalui pendekatan ini dijabarkan mengenai kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh dinas sosial terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial serta dikaji mendalam mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan dengan melihat realita tentang nasib para lansia terlantar yang semestinya dilindungi negara.

D. Pembahasan

- a. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Lansia Terlantar Menurut Pasal 9 Dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Dalam Memperoleh Pelayanan Publik Panti Werdha

Total PMKS di Kabupaten Kediri pada tahun 2011 menurut Kepala Seksi Penyantunan Sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar Kabupaten Kediri adalah sebanyak 4872 jiwa. Dan untuk Lansia terlantar menurut Kepala Seksi Penyantunan Sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar Dinas Sosial Kabupaten Kediri yang saat ini tercatat sebanyak 2015 jiwa, tetapi tidak semua lansia terlantar tersebut berasal dari Kabupaten Kediri. Menurut Kepala Seksi Penyantunan Sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar Kabupaten Kediri ada beberapa faktor yang menyebabkan para lansia ini menjadi terlantar yaitu:

1. Dari keluarga miskin
2. Dianggap gila oleh keluarga
3. Perantauan yang lama tidak pulang
4. Konflik Keluarga

Dan jaminan sosial yang dimaksud dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kediri menurut pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan, diperkuat lagi di dalam penjelasan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial tersebut yang dimaksud dengan asuransi kesejahteraan sosial adalah asuransi yang secara khusus diberikan kepada warga negara tidak mampu dan tidak terakses oleh sistem asuransi sosial pada umumnya yang berbasis pada kontribusi peserta, dan yang dimaksud dengan bantuan langsung berkelanjutan adalah bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian.

Tanggung jawab Pemerintah untuk pemenuhan jaminan sosial bagi para lansia terlantar di Kabupaten Kediri ini dibebankan kepada Dinas Sosial Kabupaten Kediri, namun menurut Kepala Seksi Penyalangan Sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar Dinas Sosial Kabupaten Kediri, tanggung jawab tersebut tidak diperkuat dengan Perda ataupun Perbup Kabupaten Kediri yang mengatur tentang kesejahteraan sosial, sehingga program-program tersebut berdasarkan inisiatif dari Dinas Sosial Kabupaten Kediri itu sendiri dan berdasarkan Rencana Strategis dari Kementerian Sosial untuk tahun 2010-2014.

Untuk pelaksanaan pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menurut Kepala Seksi Penyalangan Sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar Dinas Sosial Kabupaten Kediri sudah dilakukan dana tersebut diambilkan dari Anggaran bantuan sosial Kabupaten Kediri walaupun menurutnya Anggaran Bantuan Sosial untuk lansia terlantar sangat kecil karena harus dibagi dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya ini juga menjadi hambatan mengapa pelaksanaan jaminan sosial bagi lansia terlantar tidak maksimal dilakukan, hal ini juga dibenarkan oleh Pengelola Panti Werdha Santo Yosep Kediri bahwa ada asuransi kesehatan dari Pemerintah Kabupaten Kediri walaupun itu dirasakan tidak memadai, selama ini untuk melakukan perlindungan kesejahteraan terhadap penghuni

Panti Werdha, pengelola panti harus mencari sumbangan-sumbangan dari donatur baik itu individu maupun instansi-instansi swasta di luar pemerintah daerah, kepedulian Pemerintah Kabupaten Kediri sangat minim terhadap keberadaan Panti Werdha, sehingga pengelola berinisiatif untuk melakukannya secara mandiri dengan mencari sumber-sumber dana yang tidak mengikat.

Di Panti Werdha Santo Yosep ada 44 lansia terlantar yang selama ini diberikan perlindungan kesejahteraan oleh Pengelola Panti Werdha Santo Yosep. Menurut Pengelola Panti Werdha asal lansia terlantar itu dari berbagai daerah namun mayoritas berasal dari Karisidenan Kediri. Upaya yang dilakukan oleh pengelola Panti Sosial pun sudah cukup maksimal untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar para lansia terlantar tersebut. Menurut Tmn selama 5 tahun dirinya sebagai penghuni Panti Werdha Santo Yosep pelayanan dari Pengelola Panti Werdha dirasakan sudah bagus dan nyaman, kebutuhan-kebutuhan dasarnya terpenuhi, seperti makanan, pakaian, obat dan setiap minggu penghuni diajak untuk melakukan senam.

Pemerintah Kabupaten Kediri dalam hal ini Dinas Sosial jarang sekali melakukan kunjungan ataupun pembinaan kepada Penghuni Panti Werdha, biasanya pemerintah dalam kunjungannya memberikan hiburan dan melakukan pengecekan terhadap kondisi kesehatan para lansia di panti Werdha Santo Yosep. Kalaupun melakukan kunjungan hanya menemui pengurus panti. Bahkan ketika mereka masih berada di jalanapun perhatian pemerintah terhadap keberadaan mereka dirasa kurang. Pemerintah Kabupaten Kediri hanya menunggu laporan dari masyarakat saja, tidak bertindak secara proaktif untuk memberikan perlindungan hukum dan memberikan jaminan sosial terhadap para lansia terlantar. Jaminan sosial hanya dipenuhi oleh Pengelola Panti Werdha Santo Yosep, apabila mereka sakit dan butuh biaya pengobatan Pengelola Panti Werdhalah yang memberikan perlindungan tanpa campur tangan dari Pemerintah Kabupaten Kediri, Pengelola Panti Werdha Santo Yosep juga sudah menyediakan dokter bagi Lansia terlantar penghuni Panti Wreda Santo Yosep tersebut.

Bukan Jaminan sosial yang diberikan selama ini oleh Dinas Sosial melainkan hanyalah pemulangan dan mengirim ke panti, untuk pengiriman ke panti itupun hanyalah untuk lansia yg berpotensi saja. Sedang untuk lansia yg tidak berpotensi lagi dikembalikan ke daerah atau desa tempat dimana ada pelaporan dari masyarakat atau dengan kata lain dikembalikan kepada masyarakat. Sedang untuk lansia yg tidak berpotensi lagi dikembalikan ke daerah atau desa tempat dimana ada pelaporan dari masyarakat atau dengan kata lain dikembalikan kepada masyarakat. Paradigma yang terbangun dikalangan staf Dinas Sosial Kabupaten Kediri sampai sekarang adalah sebatas misi sosial itu artinya menurut penulis hanya sebatas *charity* atau belas kasihan semata.

Jika Lansia Terlantar tersebut bukan berasal dari Kabupaten Kediri, selama ini yang dilakukan oleh Dinas Sosial, menurut Kepala Seksi Penyantunan Sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar Dinas Sosial Kabupaten Kediri adalah mencari informasi darimana dia berasal dan mengembalikannya ke daerah asal.

Sehingga menurut penulis kalau hal ini dianalisa maka pendekatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kediri selaku pemangku kepentingan penanganan PMKS dalam hal ini lansia terlantar belum menggunakan pendekatan *Rights Based Approach* (pendekatan Hak Asasi Manusia). Pendekatan *Rights Based Approach* (pendekatan Hak Asasi Manusia) yang dimaksud disini bahwa Hak mendapatkan kesejahteraan dalam hal ini adalah hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, serta hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya kesemua hak itu dijamin oleh UUD 1945 dan negara harus memenuhi (*fullfil*), melindungi (*to protect*) dan menghormati (*to respect*).

b. Solusi Yang Ditawarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Kediri Dalam Pelaksanaan Hukum Bagi Lansia Terlantar Dalam Memperoleh Pelayanan Publik Menurut Pasal 9 Dan 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

Solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri dalam Perlindungan Hukum bagi Lansia Terlantar dalam menyikapi belum terlaksana dengan baik perlindungan hukum bagi lansia terlantar dalam memperoleh pelayanan publik adalah melalui Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dikarenakan perlu adanya kepedulian dari masyarakat/LSM terhadap permasalahan kesejahteraan sosial, sehingga permasalahan PMKS terutama Lansia terlantar bukan hanya menjadi persoalan pemerintah saja tetapi menjadi persoalan bersama masyarakat.

Yang dimaksud dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial adalah potensi dan kemampuan yang ada di dalam masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alami yang dapat digali dan didayagunakan, untuk menangani dan mencegah timbul dan berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PSKS menurut Kepala Seksi Penyantunan Sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar Dinas Sosial Kabupaten Kediri merupakan potensi-potensi yang ada di tingkat komunitas (*community support system*). Disadari bahwa diberbagai komunitas senantiasa ada potensi-potensi swakarsa yang terbukti eksis dan fungsional membantu usaha pengembangan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dari pelibatan PSKS di dalam program perlindungan hukum dan kesejahteraan sosial bagi lansia terlantar adalah untuk memperoleh data yang valid, riil dan akurat tentang kondisi dan situasi PMKS di Kabupaten Kediri untuk bahan acuan, referensi dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan perencanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang sosial terutama permasalahan langsung PMKS di Kabupaten Kediri. Namun pelibatan PSKS ini tidak hanya sebatas untuk Lansia terlantar saja tetapi terintegrasi dengan semua jenis PMKS. Di Kabupaten Kediri ada 28 PMKS yang menjadi sasaran dari program ini. Pelibatan PSKS ini menurut Kepala Seksi Penyantunan Sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar Dinas Sosial Kabupaten

Kediri adalah sebagai upaya perlindungan lansia terlantar di luar panti dan ditekankan dalam model Rehabilitasi Berbasis Masyarakat. Model Rehabilitasi Berbasis Masyarakat titik tekannya kepada Rehabilitasi Sosial.

Tindakan yang selama ini dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kediri menurut Kepala Seksi Penyantunan Sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar Dinas Sosial Kabupaten Kediri adalah penguatan kelembagaan terhadap PSKS yang ada dengan cara pembinaan dan arahan terus menerus guna tercapai usaha-usaha kesejahteraan sosial masyarakat yang mandiri dan dapat terpenuhinya perlindungan hukum dan jaminan sosial terhadap hak-hak dasar PMKS khususnya Lansia terlantar. Pelibatan PSKS ini dituangkan dalam program-program Penunjang Dinas Sosial yaitu:

- a. Pengembangan perencanaan program kesejahteraan sosial.
- b. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial.
- c. Evaluasi program kesejahteraan sosial.
- d. Penyusunan data dan informasi, serta pelaporan pembangunan kesejahteraan sosial.
- e. Penyuluhan sosial dan publikasi kesejahteraan sosial.
- f. Pendataan PMKS dan PSKS.

Jika menilik apa yang dijelaskan oleh Hadjon tentang 2 macam bentuk perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu :

- a. Perlindungan Hukum Preventif
- b. Perlindungan Hukum Represif

Maka apa yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kediri sebagai upaya perlindungan kesejahteraan sosial bagi lansia terlantar dengan pelibatan PSKS dan melalui pendekatan Model Rehabilitasi Berbasis Masyarakat titik tekannya kepada Rehabilitasi Sosial merupakan upaya untuk memberikan perlindungan hukum preventif walaupun model pendekatan yang dipakai oleh Pemerintah Kabupaten Kediri terhadap pelibatan PSKS belum begitu maksimal karena PSKS tidak dilibatkan secara penuh dari mulai perencanaan sampai kepada evaluasi.

E. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Lansia Terlantar Menurut Pasal 9 Dan 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Dalam Memperoleh Pelayanan Publik Panti Werdha Belum Terlaksana Dengan Baik dikarenakan:
 - a. Pemenuhan Jaminan Sosial bagi para lansia terlantar di Kabupaten Kediri tidak diperkuat dengan Perda ataupun Perbup Kabupaten Kediri.
 - b. Anggaran Bantuan Sosial untuk lansia terlantar sangat kecil dan kepedulian Pemerintah Kabupaten Kediri sangat minim terhadap keberadaan lansia terlantar di Panti werdha sehingga pengelola berinisiatif untuk melakukannya secara mandiri.
 - c. Keberadaan para lansia terlantar kurang diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, Pemerintah Kabupaten Kediri hanya menunggu laporan dari masyarakat saja.
 - d. Paradigma yang terbangun dikalangan staf Dinas Sosial Kabupaten Kediri sampai sekarang adalah sebatas misi sosial itu artinya menurut penulis hanya sebatas *charity* atau belas kasihan semata yaitu hanya berupa santuan bukan melalui pendekatan *Rights Based Approach* (pendekatan Hak Asasi Manusia) bahwa lansia terlantar memiliki Hak kesejahteraan dalam hal ini adalah hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, serta hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya kesemua hak itu dijamin oleh UUD 1945.
 - e. Sumber Daya Manusia yang menangani Kesejahteraan Sosial untuk Lansia terlantar terbatas dikarenakan luasnya Kabupaten Kediri yang terdiri dari 29 Kecamatan.

2. Konsep yang ditawarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri dalam Perlindungan Hukum bagi Lansia Terlantar adalah dengan pelibatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada di masyarakat. Pelibatan PSKS ini ditekankan dalam model Rehabilitasi Berbasis Masyarakat. Model Rehabilitasi Berbasis Masyarakat ini titik tekannya kepada Rehabilitasi Sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Achir, Yaumil C. Agoes . 2001. ***Bunga Rampai Psikologi Perkembangan Pribadi Dari Bayi Sampai Lansia***. Jakarta.

Suharto, Edi . 2009. ***Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia***. CV. Alfabeta, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Internet

<http://www.bps.go.id/?news=940>, diakses Oktober 2012

<http://www.Kfm.depsos.do.id>, diakses Oktober 2012

Wikipedia, 2012.